

## BAB IV

### KEKUATAN DAN KELEMAHAN PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

#### A. Kekuatan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri

##### 1 Depolitisasi Agama

Muhammad Abid Al-Jabiri memisahkan Agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi Agama untuk tujuan-tujuan politik dengan pertimbangan bahwa Agama adalah mutlak dan permanen sedangkan politik bersifat relatif dan berubah, menurutnya politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan Agama harus dibersihkan dari hal-hal yang berbau politik.

Subtansi dan ruh agama adalah untuk mempersatukan umat bukan mengelompokkannya, dan agama Islam adalah agama yang mengajarkan hal tersebut. Karena itu, mengikat agama dengan politik seperti apapun kadar dan jenis ikatan tersebut otomatis akan membawa kepada Sektarianisme dan kemudian kepada perang saudara. Sejarah, yang telah terjadi merupakan saksi atas hal ini. Sejak masa Usman saat pertama dimulainya fungsionalisasi agama dalam politik, dimasyarakat Islam perselisihan terjadi hingga perang saudara tak kunjung padam bahkan berulang kembali dalam berbagai bentuknya dan selalu saja penyebabnya adalah fungsionalisasi agama dalam politik dengan segala bentuk dan caranya.

Menurut penulis seperti dukungan yang diberikan oleh para ulama dengan dipakainya simbol-simbol keagamaan dalam kampanye, seperti doa bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh agama itu sangat besar dalam kegiatan politik, terutama dalam meraup suara yang berujung pada teraihnya kemenangan untuk berkuasa dengan menggunakan politik dengan simbol-simbol agama. Justru cara-cara inilah yang dianggap mempolitisasi agama dan sering mengorbankan nilai-nilai agama itu sendiri. Dengan berlindung kepada agama dengan cara membuat doktrin perbedaan hak termasuk di dalamnya perbedaan kelas dalam politik berdasarkan agama.

Praktik politik dengan nilai-nilai agama, jika dengan agama dan politik dikaitkan dan ingin membangun kehidupan yang demokratis dan mensejahterakan masyarakat serta membawa ketertiban dan dapat memberikan solusi pada umat tidak ada dikriminasi soal agama, tapi jika sebaliknya memisahkannya adalah solusi terbaik bagi kedamaian umat maka politik meski harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau agama, karena sudah banyak contoh yang diambil untuk dijadikan pelajaran.

## 2 Ideologi Barat Dalam Nilai-Nilai Islam

Al-Jabiri mengakui bahwa demokrasi berasal dari pengalaman Barat, namun tidak ada halangan bagi kita untuk mengembangkannya dalam kerangka rujukan Islam karena masalah ini adalah masalah Ijtihad dan nampaknya menurutnya demokrasi adalah pilihan yang paling tepat

Menurut Al-Jabiri adalah satu keharusan manjauhkan slogan Sekularisme dari kamus pemikiran Arab dan menggantikannya dengan slogan Demokrasi dan Rasionalisme, Konsep ini merupakan kebutuhan masyarakat Arab. Rasionalisme adalah upaya menjalankan politik, standar-standar logika.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Al-Jabiri dengan bentuk Demokrasi dan Rasionalisme, menempatkan Islam pada posisinya yang layak dalam teori dan praktik, bahwa Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak ditangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.

Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.

Kekuatan demokrasi dapat membuat terjalinnya hubungan antar umat beragama bersatu dalam membangun Negara, dalam artian tidak mengucilkan satu sama lain, saling tolong menolong, semua agama mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama. Rasionalisme juga memiliki sisi positifnya menjalankan politik dengan standar logika etika politik yang berdasarkan akal bukan berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme kelompok. Karena dalam Islam juga

memiliki spirit menegakkan keadilan dalam masyarakat. Ayat-ayat Alquran, demikian pula Hadis Nabi Saw. banyak menyebutkan nilai-nilai seperti persamaan, keadilan sosial, kebebasan, kesetaraan yang mana nilai-nilai tersebut selaras dengan arah yang hendak dituju oleh Negara. Yang seharusnya diperhatikan adalah pembagian fungsi dan tugas masing-masing. Dengan adanya mekanisme operasionalitas yang jelas ini, keduanya bisa menjalankan fungsinya tanpa terjadi tumpang tindih.

Berbeda dengan Demokrasi Barat, yang dimaksud oleh Al-Jabiri ialah merujuk kepada Demokrasi tetapi peran Mujtahid untuk berijtihad soal Negara masih dibutuhkan, bila Demokrasi Barat bisa saja dimanfaatkan oleh politisi-politisi professional Eropa untuk memanipulasi dan memaksakan kehendak-kehendak mereka yang jauh dari moral agama. Seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal ulama kontemporer dari India jelas menolak segala bentuk otoritarisme dan kediktatoran, Namun Islam juga tidak menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritualnya.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Al-Jabiri dengan bentuk Demokrasi dan Rasionalisme, menempatkan Islam pada posisinya yang layak dalam teori dan praktik, bahwa Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak ditangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.

Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat

menjadi lebih terjamin di bawah Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan

Kekuatan demokrasi dapat membuat terjalinnya hubungan antar umat beragama bersatu dalam membangun Negara, dalam artian tidak mengucilkan satu sama lain, saling tolong menolong, semua agama mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama. Rasionalisme juga memiliki sisi positifnya menjalankan politik dengan standart logika etika politik yang berdasarkan akal bukan berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme kelompok.

### 3 Kritik Terhadap Praktik Politik Arab

Pemikiran Al-Jabiri tentang nalar politik Arab sebagai temuan pemikiran baru, Ia menawarkan sebuah konsep yang berguna untuk memberikan arah kepada kawasan di Arab-Islam pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

Dengan cara memadukan kritik terhadap masa kini dan masa lalu. Kritik terhadap masa kini, dimana objeknya adalah sisa-sisa masa lalu yang masih terbawa hingga saat ini, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk perbaikan masa depan.

Pembaharuan yang dituntutnya seperti qabillah, ghanimah dan aqidah yaitu dengan cara mengubah pola pikir qabilah menjadi bukan qabilah, seperti dalam bentuk sistem sosial politik kewargaan (masyarakat madani), seperti badan

politik, badan usaha, ornop (LSM), institusi Negara. Membangun suatu masyarakat di mana sistem sosialnya membedakan dengan jelas antara masyarakat politik (politisi) dengan masyarakat non-politik. Yang kedua mengubah pola pikir menjadi sistem ekonomi yang konsumtif menjadi sistem ekonomi yang produktif. Dan yang ketiga mengubah pola pikir akidah yaitu membebaskan pola pikir yang sektarian dan dogmatis, baik dalam bidang keagamaan maupun keilmuan, diganti dengan pola pikir yang inovatif dan kritis.

## **B. Kelemahan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri**

### **1 Ahistoris (Praktik Nabi dan Rasul)**

Muhammad Abid Al-Jabiri menyatakan bahwa harus ada sebuah rujukan yang tak terbantahkan, dan bahwa satu-satunya rujukan yang tersedia kaum Muslim adalah kerja praktik Nabi dan Khulafaurrasyidin. Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa semua yang Barat paksakan diterima untuk merombak baik masyarakat maupun peradaban di Arab dengan model Barat yang telah dibangun itu merupakan praktik historis dan bukan dogma atau perintah keagamaan.

Karena rujukan utamanya adalah sebuah pengalaman historis dengan praktik Sahabat, pengalaman itu seharusnya ditempatkan kembali dalam konteks yang sebenarnya sebelum diambil sebagai pelajaran, karena kebenaran harus dipertimbangkan. Orang Muslim pertama memahami dan mempraktikkan agama tidak semata-mata hanya sebagai sikap spiritual dalam kaitannya dengan Sang Khalik, tetapi juga sebagai sebuah kehidupan yang terorganisasi, perkembangan

cepat dari sebuah komunitas yang selanjutnya menjadi suatu wujud sosiopolitik, wafatnya Rasulullah telah dirasakan sebagai sebuah kekosongan institusional.

## 2 Menempatkan Agama Sebagai Urusan Individu

Menurut Al-Jabiri bahwa urusan agama adalah urusan individu, bahkan negarapun tidak dapat mengaturnya. Menurut penulis bahwa Manusia banyak memiliki kelemahan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu yang pada akhirnya sepakat untuk mendirikan Negara. Lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dan harus memiliki agama yang dihayati untuk dijadikan pedoman dan landasan hidup.

Pada dasarnya Agama memiliki nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia, oleh karena itu manusia yang menganut agama di dalam bernegara semestinya membentuk suatu Lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan Agama yang ada di Negara tersebut, fungsi dari undang-undang ini untuk mengatur agar tidak terjadi kebebasan di dalam kehidupan beragama di suatu Negara meski dalam Negara tersebut menganut sistem demokrasi yang tidak jauh dari moral agama. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan manusia akan melakukan tindakan yang jauh menyimpang dari batasan-batasan dan nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia yang diatur oleh Agama.